

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019



TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 7).

1.2 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk provinsi Bengkulu pada tahun 2019 mencapai 2.007.827 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2019 meningkat 0,41 persen dari tahun 2018 yaitu sebanyak 1.999.539 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.029.520 jiwa penduduk laki-laki dan 978.307 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya, penduduk Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,91 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,80 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,03.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Laki - laki	Peremp	Jumlah	Jumlah
		(Jiwa)	uan (Jiwa)	(Jiwa)	KK
1	BENGKULU SELATAN	86.662	82.857	169.519	49.056
2	REJANG LEBONG	143.532	136.610	280.142	87.299
3	BENGKULU UTARA	147.672	140.133	287.805	91.202
4	KAUR	67.608	63.137	130.745	38.459
5	SELUMA	110.043	102.592	212.635	64.783
6	MUKOMUKO	94.558	88.536	183.094	54.185
7	LEBONG	54.937	52.359	107.296	36.030
8	KEPAHIANG	78.378	73.570	151.948	46.210
9	BENGKULU TENGAH	58.841	55.667	114.508	34.358
10	KOTA BENGKULU	187.289	182.846	370.135	105.175
Jumlah		1.029.520	978.307	2.007.827	606.757

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2019

BAB II

CAPAIAN KINERJA MAKRO

2.1. VISI DAN MISI PROVINSI BENGKULU

1. VISI PROVINSI BENGKULU

Visi Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN BERDAYA SAING TINGGI”

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi adalah (1) terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2) meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan dan mengayomi; (3) mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan, memiliki kebanggaan terhadap sumberdaya yang ada dan menjunjung tinggi martabat bangsa; (4) meningkatnya daya saing Provinsi Bengkulu dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan.

2. MISI PROVINSI BENGKULU

Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera dan bermartabat, maka misi yang diemban lima tahun ke depan adalah:

1. Misi Pertama : Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public.
2. Misi Kedua : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

3. Misi Ketiga : Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
4. Misi Keempat :Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal.
5. Misi Kelima : Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
6. Misi Keenam : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Misi Ketujuh : Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
8. Misi Kedelapan : Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, berkesadaran wisata dan demokratis.

2.2. ANGKA KEMISKINAN

Berdasarkan target kinerja penurunan angka kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 adalah sebesar 15,10%, sedangkan berdasarkan Laporan kinerja Dinas Sosial Tahun 2019 tercatat bahwa angka kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 adalah 14,91%. Sehingga apabila dibandingkan antara target dengan realisasi capaian adalah sebesar 101,3%, dan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2018 terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,03.

TABEL 2.1

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN TARGET RPJMD

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI %	% CAPAIAN
1.	2015	16,75 – 16,50	17,16	93
2.	2016	16,75 – 16,50	17,03	96,8
3.	2017	17,03-16,63	15,59	109
4.	2018	16,63-16,23	14,94	110

5.	2019	15,10	14,91	101,3
----	------	-------	-------	-------

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

2.3. ANGKA PENGANGGURAN

Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Tahun 2019 menetapkan target capaian kinerja pada indikator angka pengangguran adalah 3,21%. Pada Tahun 2019 capaian kinerja indikator angka pengangguran adalah 2,5 % artinya keberhasilan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menurunkan angka pengangguran sebesar 128,40%. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan angka pengangguran sebesar 1,01% jika dibandingkan dengan Tahun 2018.

Tabel 2.2

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA
PERSENTASEPENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI BENGKULU

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2015	2,50 – 2,10	4,91 %	0
2	2016	2,50 – 2,10	3,3 %	0
3	2017	4,89-4,69	3,74 %	73,98
4	2018	3,15	3,51	88
5	2019	3,21	3,39	94,69

Sumber Data : Dinas Ketanagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Bengkulu

BAB III

CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019, yaitu :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

6. Urusan Sosial

3.1 Urusan Pendidikan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

2) Program/Kegiatan dan Realisasi

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.000.000	34.930.000	69,86
2	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.725.300.000	1.451.824.160	84,15
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	299.440.000	266.816.500	89,11
4	Program Pendidikan Menengah	49.696.295.150	46.100.231.698	92,76
5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.224.500.000	1.090.047.600	89,02
6	Program Pendidikan Luar Biasa	9.666.360.000	8.765.457.016	90,68

7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.216.823.000	950.542.500	78,12
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	77.074.303.000	51.371.055.293	66,65
9	Program Dana BOS	94.513.000.000	94.513.000.000	100,00

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. Bengkulu Tahun 2019

3) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	$(779/957) \times 100\% = 81\%$
2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTs	$(248/302) \times 100\% = 82\%$
3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	$(103/205) \times 100\% = 50\%$
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	$(28.638/167.369) \times 100\% = 17\%$
5	Angka Kelulusan (AL) SMA/Smk/ma	$(68.391/73.414) \times 100\% = 93\%$
6	Angka Putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0
7	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$(27.182/27.182) \times 100\% = 100\%$
8	Pembinaan guru jenjang SD/MI	$(10.522/14.593) \times 100\% = 72,10\%$
8	Pembinaan guru jenjang SMP/MTs	$(5.379/6.658) \times 100\% = 80,79\%$
9	Pembinaan guru jenjang SMA/SMK	$(6.274/6.476) \times 100\% = 96,88\%$
10	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjamin Mutu Pendidikan	Tidak

4) Alokasi Anggaran

Dalam tahun 2019, urusan pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.655.081.507.083 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Bengkulu dengan realisasi sebesar Rp. 608.158.916.469,32 atau 92,84% dari total alokasi anggaran untuk urusan pendidikan.

3.2 Urusan Kesehatan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib kesehatan adalah:

- a) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
- b) Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Provinsi Bengkulu
- c) Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat Soeprapto Provinsi Bengkulu

2) Program/Kegiatan dan Realisasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85.710.000,00	71.150.000,00	83,01
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	543.950.000,00	520.164.240,00	95,63
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85.710.000,00	71.150.000,00	83,01
4	Program Pelayanan Kesehatan	925.000.000,00	630.018.212,00	68,11
5	Workshop Manajemen mutu bagi para pimpinan/managemen serta karyawwan RS	100.000.000,00	84.406.065,00	67,58
6	Program Pengadaan, Pemingkatam Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	80.427.460.000,00	79.295.868.864,31	98,59
7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	132.890.605.757,15	110.525.200.191,97	83,17
8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/	100.000.000,00	985.836.088,00	98,58

	RS Paru-Paru/ RS Mata			
--	-----------------------	--	--	--

Sumber Data :Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019

3) Tingkat Pencapaian Standar Minimal

1	Cakupan Komplikasi Kebidanan	57,25%
2	Cakupan Pertolongan Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	90,19%
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization	89,69 %
4	Cakupan Balita Gizi Buruk yang ditangani	82%
5	Cakupan penemuan kasus TBC	54%
6	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	33/100.000
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	52%
8	Cakupan Kunjungan Pelayanan Bayi	80,29%

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019

4) Alokasi Anggaran

Dalam tahun 2019, urusan wajib kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 139.471.484.400,00 realisasi Rp. 115.683.902.835,00 dengan persentase 82,94%.

3.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

2) Program/Kegiatan dan Realisasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.935.000.000,00	2.608.000.000,00	88,86
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	200.000.000,00	22.561.800,00	11,28

	Daya			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	280.000.000,00	136.988.309,00	48,92
4	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke - PU	200.000.000,00	106.750.000,00	53,38

Sumber Data :Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019

3) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1	Jalan Provinsi dalam kondisi baik	58,55%
2	Rumah Tangga Bersanitasi	80,83%
3	Kawasan Kumuh	51,21%
4	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan wilayah ber HPL/HGB	42,86%

4) Alokasi Anggaran

Dalam tahun 2019, alokasi anggaran untuk urusan wajib pekerjaan umum dan Penataan Ruang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu dengan anggaran sebesar Rp.42.559.120.537,00. Realisasi sebesar Rp. 38.838.568.363.00 atau sebesar 91,17%.

3.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Belanja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

2) Program/Kegiatan dan Realisasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	980.000.000,00	800.225.110,00	82
2	Program Pengembangan Perumahan	1.300.000.000,00	1.037.352.000,00	80
3	Program Peningkatan Pelayanan Publik	100.000.000,00	26.380.000,00	26
4	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	10.380.000,00	10.380.000,00	100
5	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	4.148.000.000,00	3.112.172.012,00	75
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.400.000.000,00	3.573.008,00	81

Sumber Data :Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019

3) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	60,18%
2	Rumah Layak Huni	8658 rumah

4) Alokasi Anggaran

Dalam tahun 2019, alokasi anggaran untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 22.592.901.999,00 realisasi sebesar Rp.15.861.865.628,00 atau sebesar 78,49%.

3.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

2) Program/Kegiatan dan Realisasi

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program peningkatan sarana dan prasarana	850.500.000,00	799.768.200,00	94,04
2	Program peningkatan disipin aparatur	452.400.000,00	438.295.000,00	96,88
3	Program Peningkatan Sumber daya manusia	1.140.000.000,00	1.032.005.276,00	90,53
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	96.000.000,00	87.576.000,00	91,23
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.840.000.000,00	1.794.053.247,00	97,50

Sumber Data :Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019

3) Alokasi Anggaran

Dalam tahun 2018 alokasi anggaran urusan wajib Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan sebesar Rp.39.783.765.387,00 dengan realisasi sebesar Rp.27.273.857.185,00,00 atau 93,69%.

3.6. URUSAN SOSIAL

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan Daerah Dinas Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

2) Program/Kegiatan dan Realisasi

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.698.000.000,00	2.658.252.000,00	98,53
2	Program Kapasitas Sumber Daya	144.150.000,00	143.568.212,00	99,60
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	110.000.000,00	107.090.068,00	97,35
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS, Lainnya	800.000.000,00	754.679.103,00	94,33
5	Program Bantuan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	400.000.000,00	387.506.000,00	96,88
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.593.000.000,00	1.522.339.200,00	95,56
7	Program Pelayanan dan Perlindungan Sosialiasi Anak	325.000.000,00	316.048.500,00	97,25

Sumber Data :Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019

3) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	27 Buah
2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	90 %

Sumber data : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2019

4) Alokasi Anggaran

Dalam tahun 2018 alokasi anggaran untuk Urusan Sosial sebesar Rp.132.256.686,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.744.655.137,00 atau 94,25%.

BAB IV

CAPAIAN ATAS PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia tahun 2018 terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Bengkulu diperoleh nilai pelayanan public dengan predikat Hijau, sehingga berdasarkan target kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menetapkan target kinerja Pelayanan Publik tahun 2019 adalah B.

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2019	Capaian Kinerja			
			Tahun 2018		Tahun 2019	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Nilai Sakip Daerah	BB	B	94,28	B	94,28
2	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	-	-
3	Indeks Profesionalitas ASN	71	-	-	50,03	70,46
4	Indeks E-Government SPBE	2,4	-	-	2,4	100
5	Indeks Keterbukaan Informasi public	60	-	-	60	100

Sumber : Dinas terkait

BAB V

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Tabel 5.1
Target dan Realisasi Pendapatan Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI TAHUN 2019 (Rp)	%	REALISASI TAHUN 2018 (Rp)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	3.303.844.486.446,53	2.939.877.463.727,87	88,98	2.851.808.282.196,75
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.136.830.607.446,53	832.494.458.383,87	73,23	872.257.738.965,75
Pajak Daerah	861.663.455.451,36	622.484.621.718,90	72,24	679.457.749.006,00
Retribusi Daerah	5.369.021.247	4.661.820.320,00	86,83	4.095.104.357,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.963.026.768,35	13.981.579.485,35	100,13	17.379.569.025,93
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	255.835.103.979,82	191.366.436.859,62	74,80	171.325.316.576,82
DANA PERIMBANGAN	2.165.945.879.000,00	2.106.267.005.344,00	97,24	1.978.482.543.231,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73.043.781.000	46.258.205.454,00	63,32	66.368.734.844,00
Dana Alokasi Umum	1.334.178.390.000,00	1.334.178.390.000,00	100,00	1.300.978.160.419,00
Dana Alokasi Khusus	161.094.868.000,00	148.677.988.196,00	92,29	110.698.383.373,00
Dana Penyesuaian	597.628.840.000,00	577.152.421.694,00	96,57	500.437.264.595,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.068.000.000,00	1.116.000.000,00	104,49	1.068.000.000,00
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	1.068.000.000,00	1.116.000.000,00	104,49	1.068.000.000,00

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 (unaudited)

II. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 3.516.542.700.667,57 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.123.503.041.131,46 atau mencapai 88,82% (sebelum dilakukan audit BPK-RI) yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2

**Target dan Realisasi Belanja pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2019**

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Belanja Daerah	3.516.542.700.667,57	3.123.503.041.131,46	88,82
Belanja Tidak Langsung	1.720.066.757.718,57	1.571.004.078.314,68	91,33
Belanja Pegawai	1.125.233.497.405,31	1.028.509.363.204,00	91,40
Belanja Hibah	358.433.786.000,00	341.978.235.000,00	95,41
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	229.399.474.313,26	196.203.764.258,68	85,53
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/K ota dan Pemerintahan Desa/Partai	2.000.000.000,00	1.598.555.852,00	79,93
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.714.160.000,00	54,28
Belanja Langsung	1.796.475.942.949,00	1.552.498.962.816,78	86,42
Belanja Pegawai	37.451.908.920,00	32.741.001.291,00	87,42
Belanja Barang dan Jasa	865.972.083.766,65	775.485.700.884,44	89,55
Belanja Modal	893.051.950.262,35	744.272.260.641,34	83,34

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019

BAB VI

KERJASAMA DAERAH

1. Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan

Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sewilayah Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Adapun output dari kesepakatan ini adalah terselenggaranya Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) berdasarkan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.

2. Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data dan Informasi Statistik di Provinsi Bengkulu

Merupakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data dan Informasi Statistik di Provinsi Bengkulu. Output dari kesepakatan ini adalah tersedianya data dan informasi statistik di Provinsi Bengkulu serta penetapan Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu sebagai Walidata Daerah melalui aplikasi SIMDASI (Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi).

3. Kerjasama Balai Konservasi Sumber daya Alam Bengkulu

Kerjasama Tentang Penguatan Fungsi Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah REG. 61 Melalui Pengembangan Pariwisata Alam di Kota Bengkulu, antara Provinsi Bengkulu dengan Balai Konservasi sumber Daya Alam. Sedangkan output dari kegiatan ini berupa 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pengelolaan TWA Danau Dendam Tak Sudah. Dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini pemerintah Provinsi Bengkulu sudah dapat mengembangkan kawasan Dendam Tak sudah sebagai salah satu lokasi unggulan pengembangan pariwisata daerah.

4. Kerjasama DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Kerjasama Tentang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Bengkulu, dengan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah nilai survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan terpadu dengan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu dengan cara mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

5. Kerjasama Disperindag dengan Balai Diklat Industri Padang

Dalam rangka mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam dalam Hal Menciptakan tenaga Kerja siap pakai yang memiliki kompetensi, penumbuhan dan pengembangan sentra industri bordir dan Fesyen di Provinsi Bengkulu telah diadakan kerjasama dengan Balai Diklat Industri Padang. Sedangkan output dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan dan pemahaman para pelaku kerajinan sulam benang emas dan kerajinan batik tulis pada IKM bordir dan fesyen di kota Bengkulu.

6. Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Badan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat.

Kerjasama ini diarahakan dalam rangka pengembangan potensi ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Adapun Output dari kegiatan ini yaitu pengajuan bantuan pemerintah untuk Paket Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar Rp. 1.984.174.281,-dan pengajuan bantuan Pemerintah untuk paket sarana ruang kreatif sebesar Rp. 113.439.000,-

BAB VII

PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH DAERAH

Selama tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menerima berbagai penghargaan antara lain :

No	PENGHARGAAN	BIDANG PENGHARGAAN
1.	Piagam Penghargaan Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah	Dukungan dan peran serta dalam penyelenggaraan dan pengiriman Tim Kesenian "Parade Lagu Daerah ke 36"
2.	Piagam Penghargaan Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah	Juara II Lomba Keindahan, Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan Wilayah Prov. Anjungan Sumatera
3.	Piagam Penghargaan Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah	Peranserta pada Kegiatan Pawai Budaya Nusantara dalam rangka Peringatan hari ulang tahun ke 44 Taman Mini Indonesia Indah
4.	Komisi Akreditasi Rumah Sakit Jakarta	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi standar Akreditasi Rumah Sakit dan Lulus Tingkat PARIPURNA
5.	Piagam Penghargaan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Kendari	Juara Harapan III Kategori Lunchbox B2SA Klaster Serealisa pada Festival Pangan Lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dalam Rangka hari pangan Sedunia XXXIX tahun 2019

6.	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Bengkulu Tahun 2019	Apresiasi atas partisipasi Disnakertrans dalam implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
7.	Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 786/KPTS/KP.590/M/11/2019 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2019	Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Utama atas Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat dengan baik
8.	Anugerah Penghargaan sebagai Badan Publik Cukup Informatif dalam implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun	keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2019 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Bengkulu
9.	Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Jakarta	Sebagai Nominasi Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2019
10.	Piagam Pamakarya dari Menteri Ketenagakerjaan RI	Atas Dukungan dan Pembinaan kepada Perusahaan yang telah berhasil mendapatkan Penghargaan Produktivitas Pamakarya Tahun 2019
11.	Penghargaan Paritrana Award Tahun 2019 dari kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan	Bentuk Konsisten Perusahaan terhadap Perlindungan Karyawan

	(kemenko-PMK)	
12.	Penghargaan sebagai Anggota jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Dukungan dan peran serta dalam penyelenggaraan dan pengiriman Tim Kesenian "Parade Lagu Daerah ke 36" berempat disasono langen budoyo
13.	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bengkulu	sebagai Badan Publik menuju Informatif dalam Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
14.	Piagam Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Baik" tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi	sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Katergori "Baik" tahun 2019
15.	Piagam Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori OPD Tingkat Provinsi	sebagai badan Publik informatif dalam implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

BAB VIII

INOVASI DAERAH

Selama tahun 2019 Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai inovasi, yaitu sebagai berikut :

1. RSJKO PROVINSI BENGKULU

Inovasi yang dibuat oleh RSJKO Provinsi Bengkulu bernama RUDABA (Rumah Damping Bahagia) yaitu berbentuk penampungan pasien RSKJ yang sudah sembuh tetapi tidak bisa dipulangkan dikarenakan sudah tidak mempunyai keluarga lagi atau keluarga dan masyarakat tidak mau menerima. Selama tahun 2019 Rumah Damping Bahagia ini sudah menampung 1.143 orang baik pasien lama maupun yang baru.

2. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU

Inovasi yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu bernama e – Pana (Elektronik Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat) yaitu Inovasi digital berupa aplikasi yang dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam membuat laporan kekerasan terhadap anak sehingga pelapor tidak harus datang secara fisik ke kantor.

3. DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU

Inovasi yang dibuat oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu berupa Pengawasan Lalu Lintas Daging Celeng Berbasis IT (Penggunaan e – Seal Lock dalam pengamanan transportasi daging celeng yang handal). Inovasi ini dibuat untuk meminimalisasi penyalahgunaan peredaran daging celeng. Dimana selama ini banyak beredar isu bahwa daging celeng asal Sumatera banyak disalahgunakan (di Pulau Jawa khususnya) untuk dioplos dengan daging halal seperti daging sapi, kambing, dll maka dinas peternakan dan kesehatan hewan membuat suatu inovasi e – Seal Lock dimana pendistribusian daging celeng menggunakan suatu system jarak jauh dengan menggunakan aplikasi yang hanya bisa dibuka dengan aplikasi yang sama setelah sampai di lokasi tujuan. E – Seal Lock ini juga dilengkapi dengan system GPS sehingga

dapat memonitor dengan jelas posisi selama perjalanan, dan otomatis dapat diketahui apabila terjadi kerusakan dan pembukaan paksa. Disamping itu juga alat ini selalu menunjukkan kondisi suhu di dalam mobil box. Dengan demikian pengangkutan daging celeng dijamin tidak disalahgunakan oleh siapapun dan selalu dalam kondisi rantai dingin sehingga tidak rusak dalam perjalanan.

4. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Inovasi yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu berupa Automatisasi Perpustakaan berupa inovasi digital yang dibuat untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan mempermudah masyarakat untuk dapat membaca dimanapun tanpa harus secara fisik datang ke perpustakaan. Aplikasi ini dapat diakses dengan perangkat Hp Android dan PC/Laptop, cara mengakses layanan ini cukup mudah dengan menginstal melalui google play dan playstore. Saat ini e – Perpus Provinsi Bengkulu mempunyai koleksi e – Book digital Provinsi Bengkulu sebanyak 3000 judul buku dengan jumlah 3000 eksemplar. Dengan berbagai koleksi bacaan untuk anak, bacaan untuk remaja, pengetahuan umum, komik, resep –resep masakan dengan total pengunjung selama tahun 2019 sebanyak 388 orang pengunjung.

5. BKD PROVINSI BENGKULU

Inovasi yang dibuat oleh BKD Provinsi Bengkulu yaitu bernama ARIN (Arsip Elektronik Kepegawaian) yaitu merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk membantu dalam pengelolaan arsip kepegawaian elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2019 sudah sebanyak 10. 629 Orang data ASN Provinsi Bengkulu yang diarsipkan ke dalam ARIN.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Inovasi yang dibuat oleh DPTMPTSP yaitu inovasi non digital berupa Bincang Santai Ngobrol Perizinan dan Investasi (BISA NGOPI) merupakan Pelayanan perizinan secara mobile dalam bentuk bincang ringan permasalahan dalam perizinan dan investasi dengan panduan seorang host sekaligus melaksanakan pelayanan perizinan dan pendampingan LKPM, serta sebagai ajang promosi investasi yang dilaksanakan dengan konsep outdoor dan secara live ditayangkan di media sosial. Dengan adanya inovasi ini izin investasi di Provinsi Bengkulu meningkat dari total izin investasi 138, dengan total investasi sebanyak 6,7 T pada tahun 2018 naik menjadi total izin investasi 239, dengan total investasi 7,6 T pada tahun 2019.

7. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU

Inovasi yang dibuat oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu yaitu berupa Aplikasi e – Statistik berupa aplikasi digital berbasis website yang di bangun bertujuan untuk menyajikan data sektoral Provinsi Bengkulu secara online, sehingga mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat Provinsi Bengkulu kapanpun dan diamanapun. Data sektoral yang terdapat dalam website adalah ESDM, Kesehatan, Keuangan, Kominfo, Koperasi, Pariwisata, Pegawai, Pekerjaan Umum, Pendidikan, Penduduk, Perhubungan, Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perpustakaan dan Sosial.

8. DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI BENGKULU

Inovasi yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu yaitu Online Data Sistem (ODS) merupakan sistem aplikasi pendataan koperasi dan UKM yang dapat diakses secara online oleh para pihak yang berkepentingan yang ada pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi KUKM diselenggarakan oleh Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dimana suatu koperasi dikatakan aktif apabila memiliki Badan Hukum dan NIK (Nomor Induk Koperasi). Dimana selama ini koperasi di Provinsi Bengkulu hanya memiliki badan hukum saja belum memiliki NIK dan untuk mendapatkan NIK tersebut harus melewati tahap verifikasi yang ada di dalam Online Data Sistem tersebut. Untuk tahun 2019 dari total 63 koperasi binaan provinsi yang sudah terverifikasi dan dinyatakan aktif ada 43 koperasi.

9. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. YUNUS BENGKULU

Inovasi daerah yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus yaitu inovasi pelayanan pendaftaran mandiri dan layanan cepat tanpa antri “FAST TRACK” yaitu inovasi digital dimana pasien bisa melakukan pendaftaran mandiri menggunakan mesin yang disediakan di RSMY dan selama tahun 2019 sudah digunakan oleh 54.483 orang pasien yang

terdaftar di RSMY sehingga proses administrasi pendaftaran dapat dilakukan lebih cepat dari sebelumnya. Sedangkan untuk inovasi Fast Track yaitu inovasi non digital yang dibuat khusus untuk pasien berusia 65 tahun ke atas serta pasien berkebutuhan khusus seperti tidak bisa jalan, kanker, stroke, atau penyakit lainnya yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk mengantri dalam waktu yang lama. Sehingga pihak RSMY membuat inovasi agar pasien berkebutuhan khusus ini bisa melakukan pendaftaran dan administrasi lainnya di jalur khusus dipisahkan dari pasien yang lain. Selama tahun 2019 dari total 10.508 pasien berkebutuhan khusus sudah sekitar 6.000 pasien yang mendapat perlakuan Fast Track ini.

BAB VIII

PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dimana RLPPD memuat capaian kinerja makro, ringkasan kinerja urusan wajib pelayanan dasar, capaian atas perwujudan pemerintahan yang Good Governance, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran belanja daerah, dan Kerjasama daerah.

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan kemajuan di Provinsi Bengkulu yang kita cintai.

Bengkulu, 20 Juli 2020

GUBERNUR BENGKULU



H. ROHIDIN MERSYAH